STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA KEARSIPAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Azmi

Abstract

ASEAN Economic Society (AEC) 2015 is the implementation of free trade market in Southeast Asia. The objective is to raise economic stability in ASEAN region. This economic stability then will overcome economic problems among countries' members of ASEAN. In terms of free trade market of ASEAN Economic Society (AEC), competition is considered equitable; even it is regarded as both opportunities and challenges. Of the many sources and experts' commendations concerning the enactment of the AEC, almost half of them expressed doubts that Indonesia is ready to face the AEC challenges. More over, numerous professions, including archival professions in Indonesia are more pessimistic or cynical rather than optimistic or grateful towards AEC. The Indonesian archival labors believe that the archival employment in Indonesia is "a big market" in AEC and it will be filled by archival labors from other countries' members of ASEAN. As for the Indonesian archival labors, there will be no empty seat for them and they can only wait for their faiths. It is the consequence of the enactment of AEC. The accuracy of selecting strategies for labor competitions in facing AEC challenge is one of the key successes in ASEAN labor market sectors. This writing is trying to elaborate the strategies of improving competitiveness among archival labors in Indonesia in order to challenge free trade market of AEC. The approach is using cultural strategy which has been explained by C.A. Peursen. There are three main points that need to be developed in applying cultural strategy of C.A. van Peursen for AEC challange, namely, ability to get to know information concerning AEC, language ability of ASEAN members' countries, and competency of Indonesian archival labors. Through these three points, the Indonesian archival labors are trying to make a moving forward step from mythical to ontological phase and then will continue to functional phase. The last phase occurs when the Indonesian archival labors shall reach obvious position in the AEC free trade market.

Keywords: *Indonesian archival labors, AEC, ASEAN, free trade market, strategy*

A. Pendahuluan

Pada akhir 2015 masyarakat Asia Tenggara akan memasuki era baru, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC), yang merupakan era pasar bebas di wilayah Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara anggota ASEANdengan jumlah penduduk terbanyakdan wilayah terluas, tentunyaakan merasakan dampak langsung atas pemberlakuan MEA.

Masyarakat Indonesia harus mempersiapkan diri secara baik untukmenghadapi persaingan yang akan terjadi nanti dalam MEA. Hal ini harus dilakukan mengingat dampak kebijakan MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, perawat, pengacara, akuntan, tenaga kerja kearsipan, dan lain-lain. Intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang semula tertutup atau minim tenaga asingnya.

Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau *International Labor Organization* (ILO) menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di Asia Tenggara. *Boston Consulting Group* data 2013 memperkirakan, pada 2020 akan terjadi kekurangan tenaga kerja sebanyak 50 persen untuk mengisi lowongan jabatan (Kompas, 12/7/2015).

Jika masyarakat Indonesia tidak mengantisipasi hal tersebut dengan profesionalisme, bukan tidak mungkin banyak pekerjaan di negeri ini akan diambil alih tenaga kerja asing termasuk lapangan kerja kearsipan. Di sisi lain, hal ini sebenarnya juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa menguasai pasar tenaga kerja kearsipan di Asia Tenggara. Dengan demikian, dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di bidang kearsipan Indonesia.

Kehadiran MEA membuat pertanyaan tentang kualitas tenaga kerjakearsipan Indonesia semakin penting untuk dijawab. Prinsip *free flow of skilled labor and professionals* yang diusung negara-negara ASEAN untuk memuluskan perdagangan bebas regional ASEAN membuat tantangan kualitas tenaga kerja kearsipan semakin nyata. Jadi memunculkan satu pertanyaan tentang “Apakah tenaga kerja Indonesia siap menghadapinya?.”

Sebenarnya ada apa di balik kecemasan akan era baru yang bernama MEA di tengah

masyarakat Asia Tenggara? Betulkah Indonesia merupakan negara yang paling belum siap menghadapi MEA, sehingga Indonesia hanya akan menjadi negara "pasar besar" bagi tenaga kerja kearsipan negara tetangga? Sementara tenaga kerja kearsipan Indonesia hanya akan pasrah menghadapi situasi dan kondisi itu tanpa bisa sebaliknya "menyerbu" negara-negara ASEAN dengan tenaga kerja kearsipan yang unggul.

Bertolak dari hal tersebut tenaga kerja kearsipan Indonesia membutuhkan suatu strategi yang tepat untuk menghadapi MEA, sehingga MEA bukan sebagai ancaman (*threat*) akan tetapi lebih membuka peluang (*opportunity*) bagi tenaga kerja kearsipan Indonesia untuk mengisi berbagai jabatan kearsipan di negara–negara ASEAN.

B. Permasalahan

MEA 2015 merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dalam pasar bebas MEA kompetisi dipandang sebagai sesuatu yang wajar, bahkan ditanggapi sebagai peluang sekaligus tantangan. Pemberlakuan MEA merupakan atmosfir persaingan yang menantang untuk bisa berprestasi lebih baik. Kemapanan adalah kondisi yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang ingin maju. Oleh karena itu, persaingan yang ada di lingkungan MEA harus dianggap sebagai dinamika yang senantiasa mendorong perubahan untuk semakin maju lagi. Konsekuensi logis atas kesepakatan MEA adalah aliran bebas barang dan jasa bagi negara-negara ASEAN. Hal ini tentunya dapat berdampak positif atau negatif bagi perekonomian dan ketenagaankerjaan Indonesia. Oleh karena itu, tenaga kerja kearsipan Indonesia perlu menyusun strategi persaingan agar dapat memanfaatkan momentum MEA.

Dari banyak sumber informasi dan pendapat pakar mengenai pemberlakuan MEA sebagian besar menunjukkan ada keraguan atas kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Banyak kalangan dari berbagai profesi, termasuk profesi kearsipan di tanah air lebih pesimis atau cemas daripada optimis atau senang menghadapi MEA. Ketidaksiapan sebagian besar profesi kearsipan Indonesia untuk mengahadapi konsekuensi kebebasan arus tenaga kerja kearsipan dalam skema MEA disebabkan oleh tiga hal, yakni pengetahuan tentang

MEA dengan segala aspeknya, kemampuan berbahasa negara-negara ASEAN, dan kompetensi tenaga kerjakearsipan Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan suatu strategi persaingan yang tepat untuk merebut lapangan kerja sektor kearsipan di pasar kerja ASEAN, sehingga tenaga kerja kearsipan Indonesiadapat memanfaatkan MEA dengan baik.

Menuju akhir 2015 tidak lama lagi, jika strategi daya saing ini belum dipersiapkan dengan baik, maka tenaga kerja kearsipan Indonesia akan kesulitan bersaing dengan tenaga kerja kearsipan dari negara-negara ASEAN, yang pada akhirnya hanya menjadi pihak yang *terbengong-bengong* menyaksikan lalu-lalang tenaga kerja kearsipan asing di wilayah Indonesia tercinta.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pokok kesiapan tenaga kerja kearsipan Indonesia dalam menghadapi MEA seperti diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya berangkat dari pertanyaan umum (*grand tour question*), "Bagaimana Strategi Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Kearsipan Indonesia dalam Menghadapi MEA?"

Untuk lebih fokus, maka pertanyaan umum tersebut selanjutnya diturunkan dalam sub-sub pertanyaan (*sub questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi peningkatan pengetahuan tenaga kearsipan Indonesia mengenai MEA?
2. Bagaimana strategi peningkatan kemampuan tenaga kearsipan Indonesia dalam berbahasa negara-negara ASEAN?
3. Bagaimana strategi peningkatan kompetensi tenaga kearsipan Indonesia?

D. Kerangka Konseptual

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 – 64 tahun.

Berdasarkan pengertian tenaga kearsipan dalam undang-udang tersebut, maka setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja kearsipan adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan kearsipan guna menghasilkan barang dan atau jasa kearsipan dinamis dan statis pada unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan meliputi penciptaan, penataan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis, serta penyelamatan, pengolahan, pelestarian, dan pelayanan arsip statis.

Tenaga kerja kearsipan yang memiliki kompetensi kearsipan dari lembaga pendidikan formal atau nonformal disebut arsiparis, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yakni arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Arsiparis terdiri atas Arsiparis Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Arsiparis non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Arsiparis PNS merupakan PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arsiparis non-PNS merupakan pegawai non-PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan kearsipan di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BUMN, BUMD, perguruan tinggi swasta, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, SDM kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis, dan fungsional umum di bidang kearsipan. SDM kearsipan ini bekerja di lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi swasta, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan.

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA 2015 (Bahasa Inggris: ASEAN *Economic Community* (AEC)) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. MEA merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam *Frame Framework Agreement on Enhancing* ASEAN *Economic Cooperation* pada tahun 1992. Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (ASEAN *Summit*) ke-5 di Singapura tahun 1992 diumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. Dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN *Vision* 2020 saat berlangsungnya ASEAN *Second Informal Summit*.

Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antarnegara ASEAN. Selama hampir dua dekade, ASEAN hanya terdiri dari lima negara - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand - yang pendiriannya pada tahun 1967. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam waktu yang berbeda yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999).

Gambaran karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang

adil; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Melihat karakter dan dampak, sebenarnya momentum MEA terdapat peluang yang bisa diraih oleh bangsa-bangsa ASEAN. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian ASEAN menjadi lebih baik, pemasaran barang dan jasa dapat menjangkau ke seluruh negara-negara ASEAN.

3. Strategi Kebudayaan

C.A. van Peursen (1988) menyebutkan terwujudnya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu hal-hal yang menggerakkan manusia untuk menghasilkan kebudayaan sehingga dalam hal ini kebudayaan merupakan produk kekuatan jiwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi. Oleh karena itu, walaupun manusia memiliki tubuh yang lemah bila dibandingkan dengan binatang seperti gajah, harimau, dan kerbau, tetapi dengan akalnya manusia mampu untuk menciptakan alat sehingga akhirnya dapat menjadi penguasa dunia.

Dengan kualitas badannya, manusia mampu menempatkan dirinya di seluruh dunia.Tidak seperti binatang, yang hanya dapat menempatkan diri di dalam lingkungannya. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai insan budaya karena kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia, maka kebudayaan selalu diperluas dan didinamisir. Irama kehidupan manusia yang begitu cepat dengan sendirinya akan mempengaruhi perubahan itu. Keanekaragaman sejarah kebudayaan manusia sangat sulit untuk digambarkan secara lengkap. Menurut van Peursen, sejarah kebudayaan umat manusia ini dapat dipilah menjadi tiga tahap,yaitu:

a. Tahap Mitis, yaitu sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan, seperti dipentaskan dalam mitologi-mitologi yang dinamakan bangsa-bangsa primitif.

b. Tahap Ontologis, yaitu sikap manusia yang tidak lagi hidup dalam kepungan kekuasaan kekuatan mitis, melainkan secara bebas ingin meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dahulu dirasakan sebagai kepungan. Ia mulai menyusun suatu ajaran atau teori mengenai dasar hakikat segala sesuatu (ontologi) dan mengenai segala sesuatu menurut perinciannya (ilmu-ilmu).

c. Tahap Fungsional, yaitu sikap dan alam pikiran yang tidak begitu terpesona lagi oleh lingkungannya (sikap mitis), ia tidak lagi dengan kepala dingin ambil jarak terhadap objek penyelidikannya (sikap ontologis), ia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya.

Beberapa aspek ciri tahapan fungsional yang digambarkan oleh van Peursen adalah orang mencari hubungan-hubungan antara semua bidang; arti sebuah kata atau sebuah perbuatan maupun barang dipandang menurut peran atau fungsi yang dimainkan dalam keseluruhan yang saling bertautan. Menurut Peursen, sifat tegang menjadi ciri khas perkembangan budaya manusia. Manusia mempertaruhkan diri, mengarahkan diri kepada sesuatu atau kepada lain dengan segala gairah hidup dan emosi-emosinya. Sikap eksistensil merupakan ciri khas bagi tahap fungsional: orang mencari relasi-relasi, kebertalian sebagai penganti bagi jarak dan pengetahuan objektif.

Strategi kebudayaan sebenarnya lebih luas dari hanya sekedar menyusun suatu kebijakan tertentu mengenai kebudayaan. Sebuah strategi kebudayaan akan selalu mencermati ketegangan antara sikap terbuka (transendensi) dengan sikap tertutup (imanensi) dalam pertautan antara manusia dan kekuasaan-kekuasaan disekitarnya. Kebudayaan mempunyai gerak pasang surut antara manusia dengan berbagai kekuasaan yang berkembang. Ketegangan antara imanensi dan transendensi, disertai dengan kebijaksanaan atau strategi yang mengatur ketegangan itu agar menjadi suatu yang lebih baik bagi kehidupan manusia.

Budaya adalah strategi untuk bertahan hidup dan menang.Inti dari budaya bukanlah budaya itu sendiri, melainkan strategi kebudayaan. Budaya dikatakan tinggi nilainya tidak selalu

berada dalam bentuk kesenian yang rumit seperti epos-epos kuno dan seni tari yang *adiluhung*. Dengan demikian, ketertinggalan budaya berkaitan dengan kecepatannya dalam merespons perubahan. Meskipun tidak langsung dapat dikatakan bahwa budaya tinggi adalah budaya yang adaptif dan kompetitif, namun gagasan dasar yang harus dicermati disini adalah, bahwa tinggi-rendahnya suatu budaya diletakkan dalam konteks perubahan. Itu artinya dalam sebuah pemaknaan budaya sebagai strategi.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan di atas, maka untuk menganalisis topik tulisan ini digunakan kerangka berpikir sebagai berikut.

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA KEARSIPAN DALAM MEA

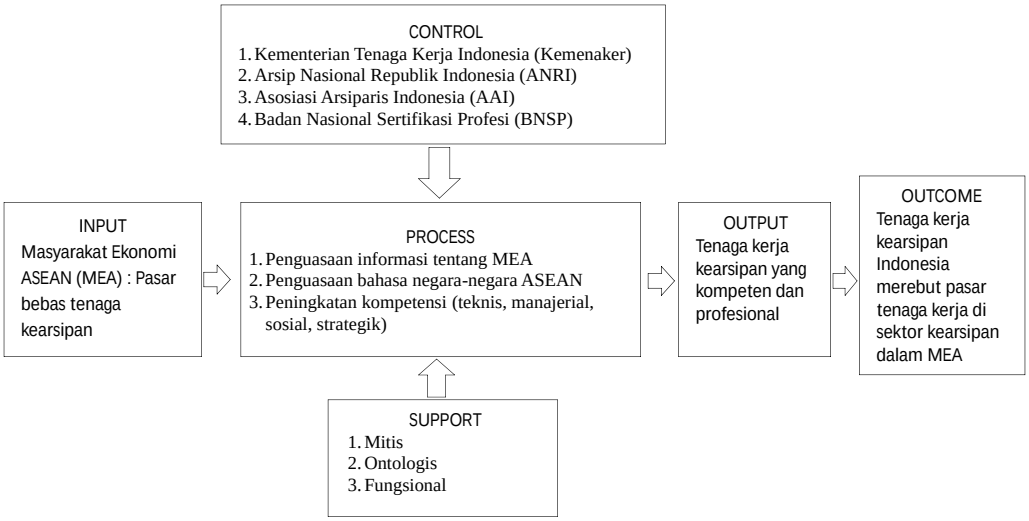

Keterangan:

1. *Input* adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, yakni sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN;
2. *Process* adalah penguatan tenaga kerja kearsipan Indonesia melalui penguasaan informasi secara maksimal tentang MEA, penguasaan bahasa-bahasa ASEAN (selain bahasa Inggris dan Melayu); peningkatan kompetensi

melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi profesi;

3. *Control* adalah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan dan dasar dalam pelaksanaan penguatan tenaga kerja kearsipan Indonesia;
4. *Support* adalah strategi kebudayaan menurut CA van Peursen yang terdiri atas tiga tahap, yakni mitis, ontologis, dan fungsional;
5. *Output* adalah tenaga kerja kearsipan Indonesia yang kompeten dan profesional yang dihasilkan dariupaya penguatan tenaga kearsipan Indonesia yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah dan didukung dengan strategi kebudayaan;
6. *Outcome* adalah keluaran atau manfaat yang diperoleh dengan tersedianya tenaga kerja kearsipan yang kompeten dan profesional, sehingga pasar tenaga kerja di sektor kearsipan dalam MEA diduduki oleh tenaga kerja kearsipan Indonesia.

F. Analisis

Bagaimana cara merumuskan strategi peningkatan daya saing tenaga kerja kearsipan Indonesia dalam menghadapi MEA? Untuk menjawab hal ini dapat digunakankonsep strategi kebudayaan menurut C.A. van Peursen (1988) dengan mengaitkan tiga tahapan mitis, ontologis, dan fungsional yang terdapat dalam strategi kebudayaan C.A. van Peursen dengan tigahal berikut ini:

1. Penguasaan informasi tentang MEA

   Globalisasi dalam dunia perekonomian, industri, dan perdagangantelah menjadikan informasi sebagai salah satu sumber daya yang langka sehingga mempunyai nilai di mata pihak yang membutuhkan dan menggunakannya. Hal ini disebabkan karena informasi menjadi elemen yang penting bagi semua pihak untuk meraih dan memenangkan peluang-peluang baru bagi kegiatan-kegiatan operasional dan bisnis dalam persaingan global. Untuk itu informasi merupakan aset strategis bagi semua pihak untuk memenangkan persaingan.

   Informasi merupakan pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran dan pengalaman yang penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Semakin banyak informasi dapat memengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan

berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Meningkatnya keberhasilan tenaga kerja kearsipan Indonesia tergantung pada kemampuan tenaga kerja kearsipan yang bersangkutan untuk mengumpulkan, menghasilkan, memelihara, dan menyebarkan pengetahuannya tentang MEA. Manajemen pengetahuan itu merupakan proses yang sistematis dan aktif dalam pengelolaan dan penggalian simpanan pengetahuan dalam diri seorang tenaga kerja kearsipan.

Kualitas informasi yang dimiliki oleh tenaga kerja kearsipan mengenai MEA harus memiliki tiga kriteria, yaitu informasinya harus akurat (*accuracy*), berarti informasi yang diperoleh memiliki kelengkapan yang baik, harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan serta diperoleh dari sumber terpercaya, karena jika informasi yang diperoleh tidak tepat dan menyesatkan akan mempengaruhi dan menentukan tindakan secara keseluruhan, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah dengan baik. Selain itu informasinya juga harus relevan (*relevancy*), yakni informasi yang diperoleh memberikan manfaat bagi tenaga kerja kearsipan Indonesia.

Perlu mengenal lingkungan yang bernama MEA itu dengan tepat. Bagaimana kondisi penduduk, sosial, budaya, pemerintahan, dan dunia usaha di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Tenaga kerja kearsipan Indonesia harus mencari informasi selengkap mungkin dan mempelajari secara mendalam informasi terkait MEA di negara-negara tersebut.

Jika hari ini SDM kearsipan Indonesia masih merasa khawatir terhadap MEA, disebabkan tenaga kerja kearsipan Indonesia sudah lama kurang mendapat informasi dan bahkan mengabaikan segala hal terkait negara-negara di Asia Tenggara. Selama ini tenaga kerja kearsipan Indonesia lebih memusatkan perhatian dan memprioritaskan informasi internasional dari negara-negara lain di luar negara ASEAN.

Berapa banyak tenaga kerja kearsipan Indonesia yang memang ahli tentang sistem dan penyelenggaraan kearsipan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei,

Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste?. Jika kita bangga masih banyak tenaga kerja kearsipan asing yang meneliti masalah kearsipan Indonesia dan mencoba memahami segala dinamika penyelenggaraan kearsipan di Indonesia, seberapa banyakkah dari tenaga kerja kearsipan Indonesia yang melakukan sebaliknya?.Jika tenaga kearsipan Indonesia sudah melakukan perubahan terhadap kondisi tersebut, maka gambaran MEA sebagai sesuatu yang menakutkan, mencemaskan, membuat tidak percaya diri, dan lain-lain akan hilang karena semua hal terkait MEA sudah diketahui, sehingga tenaga kearsipan Indonesia dapat menentukan strategi apa yang harus dilakukan selanjutnya.

2. Penguasaan bahasa negara-negara ASEAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan suatu wahana komunikasi yang disebut bahasa. Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi, bahasa untuk setiap wilayah, bagian dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sifat unik dan komplek, yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi keunikan dan kekomplekan bahasa ini harus dipelajari dan dipahami agar komunikasi lebih baik dan efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain.

Setiap masyarakat tentunya memiliki bahasa. Dalam komunikasi sehari-hari alat yang sering digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa, baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Bahasa sebagai sarana komunikasi tentunya mempunyai fungsi berdasarkan kebutuhan seseorang secara sadar atau tidak sadar yang digunakannya. Bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan diri, alat komunikasi, dan sarana untuk kontrol sosial. Setiawan (2015), mengatakan bahasa adalah kunci, menguasai bahasa berarti mampu mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu bangsa.

Secara umum fungsi bahasa sebagai alat komunikasi: lisan maupun tulis. Menurut Hallyday (1992), salah satu fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk keperluan

interaksional, yakni bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kawasan MEA yang multietnis, multiagama, dan multibahasa, kepasihan satu bahasa saja tidak cukup (misalnya bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa pemersatu kawasan ASEAN) untuk berkomunikasi dengan seluruh masyarakat ASEAN. Secara *de facto* masih banyak masyarakat ASEAN yang belum fasih dalam bahasa Inggris, sehingga bahasa akan menjadi hambatan yang jelas dalam berinteraksi dalam MEA. Oleh karena itu, untuk mengetahui banyak hal tentang MEA apakah informasi atau pengetahuan mengenai penduduk, sosial, budaya, pemerintahan, dan dunia usaha negara-negara Asia Tenggara, maka kuncinya adalah penguasaan bahasa negara-negara ASEAN.

Kita mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa ada beberapa *outlet retail* di beberapa kota besar di Indonesia telah memperkejakan sejumlah anak muda asal Thailand yang fasih berbahasa Indonesia. Tidak sedikit orang-orang Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar saat ini sedang serius mempelajari bahasa Indonesia agar dapat berinteraksi dengan orang-orang Indonesia, sehingga mereka dapat bekerja di perusahaan-perusahaan nasional dan multi nasional yang berada di wilayah Indonesia untuk berbagai profesi atau bidang pekerjaan termasuk pada profesi atau bidang kearsipan.

Sebaliknya, apakah ada cukup banyak tenaga kerja kearsipan Indonesia yang bisa berbahasa orang Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar, dll. Dengan demikian tenaga kerja kearsipan Indonesia dapat berinteraksi dengan orang-orang di negara-negara tersebut, sehingga dapat bersaing dalam merebut lapangan kerja di bidang kearsipan pada perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di wilayah negara-negara ASEAN.

Dengan banyaknya tenaga kearsipan Indonesia yang menguasai bahasa negara-negara ASEAN (selain Malaysia dan Brunei), bahkan dapat menerbitkan buku-buku kearsipan negara Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste dengan menggunakan bahasa negara setempat, sehinga tercipta kondisi masyarakat negara-negara tersebut belajar

kepada tenaga kerja kearsipan Indonesia untuk mengetahui kearsipan negaranya masing-masing.

3. Kompetensi tenaga kearsipan Indonesia

Tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi dan kompetitif, menuntut kemampuan profesional yang semakin baik bagi para pekerja. Hanya tenaga yang selalu mau dan berusaha meningkatkan kemampuannya yang mampu bertahan dan maju terus karena mampu memenuhi harapan yang senantiasa berubah yang diarahkan kepadanya. Profesionalitas bukan hanya dibatasi sebagai sebutan yang khas dalam profesi tertentu, melainkan mencakup dunia kerja pada umumnya. Seluruh dunia kerja, apapun pekerjaan itu, menuntut kemampuan profesionalitas yang semakin baik. Profesionalitas seorang tenaga kerja karena ia memiliki kepandaian khusus di bidangnya yang diakui oleh asosiasi profesi melalui proses sertifikasi.

Pasar kerja nasional dan internasional menuntut tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikasi di setiap bidang. Pasalnya, sertifikasi akan memberikan beberapa manfaat bagi tenaga kerja, antara lain meningkatkan mobilitas, daya saing, pengakuan kompetensi, prospek karier, rasa percaya diri, dan kebanggaan. Sertifikasi berguna bagi pribadi, perusahaan, dan negara. Bagi sisi pribadi, seorang tenaga kerja yang sudah tersertifikasi akan lebih mudah untuk berkarier. Bagi perusahaan, dengan adanya sertifikasi pekerja, mereka akan lebih mudah untuk merekrut karyawan yang sesuai kriteria. Sedangkan bagi negara, terjaminnya sertifikasi akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Selain itu, negara lebih mudah ketika melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain, khususnya dalam hal perekrutan tenaga kerja.

Kearsipan merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (profesi), sehingga untuk melakukan pekerjaan kearsipan diperlukan kepandaian khusus (profesional). Tenaga kerja kearsipan Indonesia harus mampu bertindak secara profesional (profesionalitas) dalam menghadapi permasalahan kearsipan yang dihadapkan kepadanya. Profesionalitas tenaga kerja kearsipandibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi yang didirikan oleh asosiasi

atau organisasi profesi arsiparis nasional maupun internasional. Jenis bidang kompetensi kearsipan yang harus mendapat sertifikasi, yakni kompetensi dalam pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip menjadi informasi.

Sebagaimana diketahui bahwa organisasi tidak ada dalam suasana vakum, akan tetapi senantiasa dituntut dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang begitu kompleks dan kompetitif. Dalam hubungan ini maka eksistensi tenaga kerja kearsipan semakin penting dan mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Tenaga kerja kearsipan Indonesia harus mampu menjadi mediator yang menghubungkan publik dengan informasi arsip yang diciptakan atau dihasilkan oleh organisasi agar dapat melayani publik secara baik.

Agar tenaga kerja kearsipan Indonesia dapat berperan, berfungsi, dan mampu bersaing, maka kompetensi tenaga kerja kearsipan Indonesia harus diakui oleh organisasi profesi arsiparis nasional maupun internasional merupakan prasyarat, yang tidak dapat diabaikan karena melalui kompetensi yang berkualitas akan menunjukkan kemampuan (*competency*) sebagaimana diharapkan. Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja kearsipan Indonesia dalam melaksanakan tugas kearsipan yang ditekankan kepadanya dalam organisasi tempat ia bekerja. Selain kompetensi teknis di bidang kearsipan (*technical competence*) tenaga kerja kearsipan Indonesia perlu memiliki jenis kompetensi lain agar mampu bersaing dengan tenaga kerja kearsipan negara-negara lain. Hal ini penting karena posisi jabatan pekerjaan kearsipan pada perusahaan bisa sebagai manajer pusat arsip (*records center manager*), koordinator kelompok kerja (*task force coordinator*), supervisor program (*programe supervisor*).

Kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi jabatan pekerjaan kearsipan tersebut adalah. Pertama, kompetensi manajerial (*managerial competence*), yakni kompetensi yang berhubungan dengan

berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi, seperti kematangan merencanakan pekerjaan, kemampuan mengkoordinir tim kerja, kemampuan pengawasan, kemampuan memecahkan persoalan kearsipan. Kompetensi ini diperlukan untuk posisi memimpin pusat arsip (*records center*) pada suatu perusahaan. Kedua, kompetensi sosial (*social competence*), yakni kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, bernegosiasi, berinteraksi, dan bersosialisasi. Kompetensi ini diperlukan untuk posisi sebagai kelompok kerja (*task force coordinator*). Ketiga, kompetensi intelektual atau strategik (*intetectual* atau *strategic competence*), yakni kemampuan untuk berpikir secara strategik dengan visi jauh ke depan, seperti kemampuan menganalisa masalah, mengantisipasi, merespon dan membaca isu-isu aktual, mencapai target tugas dan tanggung jawab kearsipan secara efektif dan efisien. Kompetensi ini diperlukan untuk posisi sebagai supervisor program (*programe supervisor*).

Penerapan strategi kebudayaan C.A. van Peursen untuk meningkatkan daya saing tenaga kearsipan Indonesia dalam MEA harus mengacu kepada kebijakan pemerintah yang terkait dengan urusan ketenagaakerjaan, kearsipan, dan pendidikan di tanah air, yakni Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kearsipan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Sikap yang harus ditanamkan dalam diri tenaga kerja kearsipan Indonesia dalam menghadi pemberlakuan MEA adalah bahwa MEA merupakan arena di mana tenaga kerja kearsipan Indonesia ditantang untuk maju. Seperti yang dikatakan David Brinkley dalam Gea (2005), bahwa orang yang kuat adalah orang yang dapat meletakkan dasar dengan batu-batu yang orang lain lemparkan kepadanya. Mengacu strategi kebudayaan C.A. van Persen,

upaya tenaga kerja kearsipan Indonesia untuk menguasai informasi tentang MEA, menguasai bahasa negara-negara ASEAN, dan meningkatkan kompetensi adalah upaya mencoba menggeser tahap mitis menuju tahap ontologis. Setelah itu, akan bisa mengambil posisi yang lebih jelas, kepentingan apa yang hendak ditunjukkan. Hal ini merujuk pada tahap fungsional yang akan diambil.

Dengan penguasaan atas tiga hal tersebut di atas, tenaga kerja kearsipan Indonesia sudah meletakkan dasar yang kuat dalam menghadapi MEA. Tenaga kerja kearsipan Indonesia akan mampu bersaing dalam skala regional, sehingga bisa merebut lapangan kerja kearsipan di negara-negara ASEAN.

2. Rekomendasi

Tenaga kerja kearsipan Indonesia harus melihat "pasar besar" lapangan kerja kearsipan dalam MEA adalah perusahaan-perusahaan di negara ASEAN. Tenaga kerja kearsipan Indonesia tidak boleh menunda lagi sisa waktu sebelum diberlakukannya MEA pada penghujung 2015 untuk segera bangkit dan berbenah diri untuk menjadi tenaga kerja kearsipan yang kompetitif dan berkualitas global, jika tidak ingin menjadi pihak yang tersisih dalam persaingan tenaga kerja MEA, karena proses dan dinamika persiapan juga diikuti gerak laju negara ASEAN lain yang terus bergulir.

Upaya untuk meraih keberhasilan tenaga kerja kearsipan Indonesia dalam MEA harus didukung oleh komponen-komponen penyelenggara ketenaga-kerjaaan, kearsipan, dan pendidikan lain di Indonesia, seperti Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kearsipan.

DAFTAR PUSTAKA

bpmpt.kendalkab.go.id/.../56-masyarakat-ekonomi-asean-2015- *MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : Penonton atau Pemain?*

Gea, Atosokhi, Antonius, (2005), *Character Building IV: Relasi dengan Dunia*, Gramedia-Jakarta.

Haryanto, Ignatius (2015), *Strategi Media Menghadapi MEA*, Artikel Kompas-Jakarta.

Hil, David T(2015), *Media Indonesia dalam MEA*, Artikel Kompas-Jakarta.

https://centerformunawareducation.files.wordpress.com/2013/06/, *Strategi Kebudayaan C.A van Peursen*.

Kompas (12/72015), *Inovasi Pendidikan Tingkatkan Daya Saing*. Berita, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Perbawa, Arip (2012), *Kesiapan Masyarakat Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN* 2015, Makalah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*.

Pustaka Phoenix, (2009), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta.

Sugiyono (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung; Alfabeta.

Sztompa, Piotr (2004), *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta, Prenada.

The U.S. Departement of Defense (US DoD) Records Management Program Management Office and The University of British Columbia (UBC) Master of Archival Science Research Team (1996), *Genesis and Preservation of an Agency's Archival Fonds*. Ottawa.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Walne, Peter (ed), 1992, *Dictionarry of Archival Terminologi*, German, Italian, Russian and Spanish, Muenchen-New York-London-Paris; English and French with Equivatent in Dutch.